

Peningkatan Kapasitas untuk Deteksi, Pelaporan dan Respon Dini Penyakit-Penyakit Zoonosis dengan Pendekatan One Health

Sejak tahun 2016 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen-PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) bersama-sama dengan USAID/FAO ECTAD memulai sebuah program untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia dalam bidang deteksi dini dan respon cepat terhadap penyakit-penyakit zoonosis dan Penyakit Infesius Baru/Berulang (PIB). Inisiatif ini menggunakan pendekatan One Health dalam mengendalikan penyakit melibatkan para pemangku kepentingan dari sektor kesehatan hewan, kesehatan manusia dan kesehatan satwa liar. Program ini kemudian dilaksanakan percontohannya di empat kabupaten di seluruh Indonesia: Bengkalis, Riau;

Ketapang, Kalimantan Barat; Boyolali, Jawa Tengah; dan Minahasa, Sulawesi Utara.

Pemilihan keempat wilayah percontohan tersebut didasarkan oleh perbedaan-perbedaan dalam hal zona agro-ekologi, hambatan-hambatan pemanfaatan lahan, kepadatan populasi ternak, prevalensi zoonosis dan potensi munculnya penyakit zoonosis.

Dua kemeterian teknis, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bergabung bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melaksanakan

program tersebut dibawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Dimulai pada tahun 2017, program peningkatan kapasitas One Health diujicobakan bersama para petugas dari sektor kesehatan masyarakat, kesehatan hewan dan lingkungan hidup serta kehutanan. Program ini menyasar pada penguatan jejaring antara semua sektor berbeda serta mempromosikan koordinasi dalam kegiatan pengendalian penyakit melalui serangkaian kegiatan pelatihan.

Capaian sejauh ini

Peningkatan kapasitas Pemerintah RI sampai saat ini telah berhasil melatih 75 Master Trainers (MT) dan 267 petugas lapang dalam bidang deteksi dan pelaporan dini serta respon cepat terhadap penyakit-penyakit zoonosis prioritas. Dalam rangka mendukung keberlanjutan upaya pelatihan dan pelaksanaan One Health di tingkat lapang, materi pelatihan dan modul kemudian dibuat untuk topik-topik: (1) Pencegahan dan pengendalian penyakit tingkat dasar untuk sektor kesehatan hewan; (2) Pengendalian penyakit tingkat dasar untuk sektor kesehatan satwa liar; (3) Modul-modul One Health untuk pengendalian penyakit secara terintegrasi; (4) Bahan ajar untuk Asosiasi

Fakultas-fakultas Kesehatan Hewan Indonesia; (5) Modul Pelatihan untuk Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara; (6) Panduan bagi para petugas kesehatan hewan untuk mengakses dana desa dalam mendukung kesehatan hewan; (7) Praktek-praktek terbaik/protokol terintegrasi (rabies, HPAI, anthraks), (8) Studi ekonomis pelaksanaan One Health; (8) Roadmap One Health/panduan untuk pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pendekatan One Health; (9) Rencana induk pemberantasan rabies; dan (10) Alat kelengkapan monitoring One Health.

Prosentase kasus gigitan anjing (suspek rabies) yang telah dilaporkan dan dikelola dengan tepat

menggunakan pendekatan One Health di kabupaten-kabupaten percontohan adalah: 36% di Ketapang; 62% di Bengkalis; 92% di Boyolali; dan 41% di Minahasa.

Program ini telah terbukti efektif, diterima secara luas dan telah diperkuat dengan pendanaan pemerintah daerah. Indikator dampak positif termasuk juga meningkatnya manajemen wabah penyakit zoonosis yang efisien dan efektif, respon kasus wabah yang lebih cepat dan meningkatnya komunikasi, kerjasama dan koordinasi lintas sektor.



Strategi Komunikasi demi Koordinasi dan Kerjasama yang Lebih Baik dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit-penyakit Zoonosis dan PIB

Sebuah Strategi Komunikasi menggunakan pendekatan One Health sebagai dasar kegiatan komunikasi untuk Zoonosis dan PIB dibutuhkan di setiap tingkatan dalam pemerintahan, sebagai bagian dari penguatan kapasitas pemerintah dalam mencegah serta mengendalikan penyakit-penyakit zoonosis prioritas tertarget di Indonesia.

Panduan komunikasi strategis memberikan kejelasan terhadap kebijakan komunikasi di Indonesia dalam mengkomunikasikan ancaman penyakit-penyakit dan juga memberikan dasar komunikasi yang selaras antara badan-badan pemerintah dan kementerian-kementerian yang merespon wabah, dengan mereka yang menangani penyakit-penyakit tersebut, atau dengan para pemangku kepentingan, petani dan pemilik hewan, serta masyarakat dan media.

Pengkinian situasi penyakit zoonosis yang akurat dan tepat waktu sangatlah pentig dalam mengurangi dampak dan penyebaran penyakit. Panduan tersebut telah disetujui dan didukung penuh oleh semua sektor dan memberikan cara terbaik untuk mengkomunikasikan ancaman-ancaman penyakit kepada masyarakat maupun kepada para pemangku kepentingan.



SIZE 2.0: Platform Berbagi Informasi One Health untuk Memperkuat Surveilans Kesehatan Terintegrasi di Indonesia

Surveilans kesehatan yang dapat diandalkan merupakan dasar praktek-praktek kesehatan yang efektif, utamanya untuk tujuan deteksi dan pelaporan dini penyakit serta respon cepat. Surveilans kesehatan didefinisikan sebagai pengumpulan, Analisa dan interpretasi data secara sistematis yang disampaikan secara rutin kepada para praktisi kesehatan (kesmas, keswan dan kesehatan satwa liar) serta para pembuat kebijakan yang bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit.

Platform One Health idealnya akan memfasilitasi pembagian informasi dan data diantara masing-masing sistem informasi, untuk kemudian dapat dianalisa dan menghasilkan informasi yang berguna untuk ditindaklanjuti dengan pembuatan keputusan dalam bidang pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB.

Dengan keterbatasan SIZE 1.0 dan kebutuhan untuk membangun keterhubungan dengan sistem informasi satwa liar (SehatSatli) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maka diperlukan sebuah platform nasional untuk mekanisme berbagi informasi di tingkat daerah/operasional/lapang yang memberikan kesempatan pertukaran

data dan informasi di antara para petugas lapang menyampaikan notifikasi, pencegahan dan respon terhadap penyakit secara cepat.

Beberapa lokakarya dan pertemuan pemutakhiran platform SIZE (selanjutnya disebut sebagai SIZE 2.0) dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 dan melibatkan kementerian-kementerian teknis terkait (Kementan, Kemenkes dan KLHK), Kemenko PMK serta mitra-mitra internasional seperti FAO, WHO dan P&R Project USAID.

SIZE 2.0 saat ini masih diujicobakan di empat wilayah percontohan One Health. Sejumlah 219 petugas lapang dari tiga sektor telah dilatih menggunakan SIZE 2.0 oleh 32 Master Trainers Nasional.

Evaluasi awal SIZE 2.0 menunjukkan bahwa 76% petugas lapang merasakan bahwa SIZE memfasilitasi tugas mereka, utamanya dalam hal (1) Koordinasi lintas sektor; (2) Berbagi data dan informasi; (3) Efektifitas pelaporan; dan (4) Penerapan upaya-upaya pencegahan yang efektif.



Keberlanjutan OH: Berbagai Sumber Pendanaan



Keberlanjutan dari sisi pendanaan pendekatan One Health merupakan salah satu tujuan utama Ditjen-PKH dan USAID/FAO ECTAD saat mempromosikan pendekatan tersebut kepada kementerian teknis terkait lainnya. Penerbitan Instruksi Presiden No. 4/2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia merupakan alat kelengkapan untuk dapat lebih jauh mengusahakan keberlanjutan kegiatan-kegiatan OH. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama dengan USAID/FAO ECTAD mengadvokasi pendekatan OH kepada Bappenas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional) agar dapat memasukkan pendekatan OH tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Secara paralel, Ditjen-PKH dan FAO juga mengembangkan panduan teknis untuk pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 101/2018 mengenai Standar Pelayanan Minimum (SPM). Keputusan ini memandatkan pemerintah daerah

untuk mengalokasikan dana untuk mengelola bencana-bencana non-alam, termasuk pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB. Penerapan pendekatan OH di lapangan diharapkan menjadi salah satu target pendanaan.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan FAO ECTAD juga sedang mengembangkan panduan teknis pemanfaatan Dana Desa. Panduan tersebut akan memberikan saran-saran sesuai prosedur yang jelas tentang bagaimana memanfaatkan Dana Desa untuk pemerintah-pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait, Puskesmas dan Puskesmas dalam mencegah dan mengendalikan zoonosis dan PIB.

Peningkatan Kebersihan dan Sanitasi untuk Mengurangi Risiko Penyebaran Virus HPAI

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen-PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) bersama dengan USAID/FAO ECTAD Indonesia telah menyusun dan mendiseminasi praktik-praktik kebersihan/sanitasi untuk mengurangi risiko virus *Highly Pathogenic Avian Influenza* (HPAI) yang tersebar di sepanjang rantai pasar unggas. Kegiatan-kegiatan ini telah meningkatkan kapasitas pegawai pasar, petugas dinas peternakan dan pedagang unggas di pasar unggas hidup (LBM) dan rumah pemotongan hewan di Jabodetabek untuk meningkatkan kebersihan melalui pembersihan dan disinfeksi yang tepat.

Kegiatan pembersihan dan disinfeksi dilaksanakan berdasarkan hasil dari surveilans Ditjen-PKH/FAO di tahun 2009-2018, yang menemukan bahwa 40-60 persen dari pasar unggas hidup di Jabodetabek terkontaminasi virus HPAI.

Ditjen-PKH dan FAO, bersama dengan pemerintah daerah di Jabodetabek melaksanakan praktik pembersihan dan disinfeksi yang ditingkatkan untuk meningkatkan biosekuriti dan restrukturisasi rantai pasar unggas. Hasilnya menunjukkan rata-rata

peningkatan 5-20% dalam praktik pembersihan dan disinfeksi. Sebuah rekomendasi telah diberikan kepada Pemerintah DKI Jakarta untuk mengakselerasi restrukturisasi pasar, berdasarkan hasil dari kajian restrukturisasi pasar unggas Ditjen-PKH/FAO dan kajian intervensi praktik-praktik universal terbaik rantai pasar unggas.

Proyek Ditjen-PKH/FAO juga menyusun paket pelatihan 3 hari mengenai intervensi biosekuriti di pasar unggas untuk pasar unggas sehat dalam kolaborasi dengan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH Cinagara) Kementan. Paket pelatihan mencakup: 1. Intervensi praktik-praktik biosekuriti di rantai pasar; 2. Pengembangan Tim Fasilitator Pembersihan dan Disinfeksi; dan 3. Bahan-bahan komunikasi, informasi dan edukasi.



Pencegahan Penyakit – Penggunaan Antibiotik yang Bijak dan Bertanggung Jawab: Pengendalian Resistensi Antimikroba

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen-PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) dan FAO ECTAD Indonesia mengakui adanya tantangan berupa tata laksana peternakan unggas yang buruk di Indonesia. Banyak peternakan unggas sektor 2 dan 3 yang saat ini masih minim dalam menjalankan praktik biosekuriti atau bahkan tidak sama sekali, merawat ternak mereka dengan buruk, serta kurang tepat dalam mendeteksi maupun mengendalikan penyakit. Praktik tata laksana yang tidak mencukupi ini meningkatkan kebutuhan penggunaan antibiotik untuk membatasi kerugian produksi. Situasi ini pun diperparah dengan kurangnya petugas dan layanan kesehatan hewan yang memenuhi persyaratan, mengakibatkan pemakaian antibiotik yang tidak tepat guna, terlalu banyak, bahkan penyalahgunaan antibiotik.

Dalam merespon tantangan-tantangan ini, Ditjen-PKH dan FAO ECTAD telah menggalakkan pengendalian AMR melalui kampanye intensif terkait penggunaan antibiotik yang bijak dan bertanggung jawab dalam proses produksi ternak. Kampanye ini diselenggarakan bersamaan dengan program pencegahan penyakit yang difokuskan kepada para peternak unggas dan perusahaan obat veteriner di daerah Jawa sejak tahun 2017. Program ini diharapkan dapat melindungi peternakan unggas dari diagnosa penyakit yang salah, penyakit-penyakit bakteri persisten yang tidak dapat diobati, mengurangi kerugian ekonomi dan membatasi resiko resistensi antimikroba pada manusia, hewan lainnya, dan lingkungan; penggunaan antibiotik yang bertanggung jawab juga akan mengurangi residu antibiotika dalam produk-produk unggas seperti daging dan telur.

Program pengendalian AMR Ditjen-PKH/FAO ECTAD turut bekerjasama dengan Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI) untuk memastikan bahwa topik-topik penting terkait AMR dan penggunaan antibiotik secara bertanggung jawab mendapatkan sorotan dalam kurikulum semua fakultas kedokteran hewan di Indonesia. FAO telah mengadakan seminar-seminar umum mengenai AMR dan penggunaan antibiotik (Antimicrobial Usage/AMU) dengan sebelas fakultas kedokteran hewan di seluruh Indonesia dan telah melibatkan

masyarakat secara langsung saat kampanye Pekan Kesadaran Antibiotik Sedunia periode 2016-2018. FAO menyelenggarakan seminar secara teratur dengan para peternak unggas saat adanya pameran ternak, seperti Indolivestock, untuk menyebarkan informasi terkait AMR kepada para peternak unggas di daerah Jawa. FAO juga bekerjasama langsung dengan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Ditjen-PKH untuk mengembangkan materi dan modul pelatihan AMR dan AMU.

